

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PELAKU UMKM
DI KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



**MUHAMMAD ILHAM ISMAIL
NIM: 105721109921**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**JUDUL PENELITIAN:
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PELAKU UMKM
DI KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ILHAM ISMAIL

NIM:105721109921

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil' alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku dan kedua kakakku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moral dan moril tak terhingga, serta orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Jangan pernah menyerah Ketika menghadapi hambatan, karena setiap kesulitan yang dihadapi akan membuatmu semakin berkembang. pada akhirnya, proses dan usaha tidak ada yang mustahil untuk dicapai



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi
Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong sELATAN
Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham Ismail
No. Stambuk/NIM : 105721109921
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti ini diperiksa dan diujikan di depan
panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 23 April 2025 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 April 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Sitti Marhumi, S.E., M.M
NIDN: 0901126906

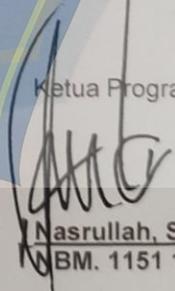

Ir. Muhammad Akib, M.M
NIDN: 0014106010

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507


Nasrullah, S.E., M.M
NBM. 1151 132



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Muhammad Ilham Ismail, Nim 105721109921 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 24 Syawal 1446 H/ 23 April 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Syawal 1446 H
23 April 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Prof. Dr. Akhmad, S.E., M.Si (.....)
2. Dr. Ismail Rasulong, S.E., M.M (.....)
3. Andi Risfan Rizaldi, S.E., M.M (.....)
4. Ir. Muhammad Akib, M.M (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Ismail
Stambuk : 105721109921
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku
UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 23 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,

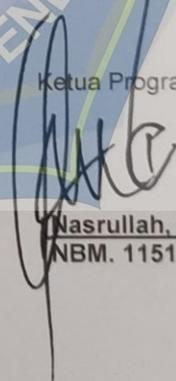

Muhammad Ilham Ismail
105721109921

Diketahui Oleh:

Dekan,


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi


Nasrullah, S.E., M.M
NBM. 1151 132

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Ismail
NIM : 105721109921
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 23 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ilham Ismail
NIM : 105721109921

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Alla SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya serta shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tak ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku Umkm Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1). Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Bapak Muh. Ilyas dan ibu Patimah yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula bentuk penghargaan yang setinggi – tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, M.T., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makkassar.

3. Bapak Nasrullah SE., M.M, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Sitti Marhumi, S.E., M.M. Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan, sehingga Skripsi selesai sebagaimana mestinya.
5. Bapak Ir. Muhammad Akib, M.M Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang Tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2021 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Bapak Camat Kecamatan Galesong Selatan beserta staffnya yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Terima kasih kepada teman-teman terkhusus teman kelas M21C yang telah menemani saya selama kuliah serta rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
11. Terima kasih teruntuk Yuliana Mulviansyah yang selalu memberikan semangat dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya

demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu' alaikum Wr. Wb



ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM ISMAIL.2025. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uiversitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Sitti Marhumi dan Muhammad Akib.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan yakni Kasi Pemerintahan, Kasi Perekonomian, Tokoh Grosir, Pengrajin, Pedagang Kaki Lima. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang di dapat adalah Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan melalui pelatihan inovasi produk, pengembangan sentra UMKM, dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, daya saing, dan pemasaran produk lokal, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM*



ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAM ISMAIL.2025. The Role of Government in Developing the Competence of SME sectors in Galesong Selatan District, Takalar Regency. Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Sitti Marhumi and Muhammad Akib.

The purpose of this study is to determine the Role of Government in Developing the Competence of SME sectors in Galesong Selatan District, Takalar Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The data processed are the results of interviews conducted with 5 informants, namely the Head of Government, Head of Economics, Wholesale Figures, Craftsmen, Street Vendors. The data collection methods used in this study are observation, interviews and documentation.

The results of the study are that the Government plays an active role in developing the competence of SME sectors in South Galesong District through product innovation training, development of SME (small medium enterprise) training. This program aims to improve skills, competitiveness, and marketing of local products, so that MSMEs can contribute more to the regional economy.

Keywords : *Role of Government, Development of SME Actor Competence*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan teori	7
B. Tinjauan Empiris	19
C. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber data	28
E. Informan.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Halaman
Gambar 2. 1	Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 3.1	Metode Analisis Data	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	35



DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Daftar Informan	29
Tabel 4.1	Daftar Informan	48



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Uraian	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian	70
Lampiran 3	Persuratan	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategi dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti menjadi penggerak utama perekonomian, khusus dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Di berbagai kecamatan, termasuk di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan utama yang menghambat perkembangan usaha mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi pelaku UMKM, baik dari segi manajerial, keuangan, pemasaran, hingga teknologi.

Pemerintah telah mengakui peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan program disusun untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi para pelakunya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan untuk berwirausaha, melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Anto et al., 2023)

Menurut Tambunan (2019), UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup

masyarakat, khususnya di negara berkembang. Tambunan menekankan bahwa UMKM sering kali mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi karena kemampuan mereka beradaptasi dengan pasar lokal dan kemauan untuk terus berinovasi dalam skala kecil.

Pengembangan SDM melingkupi beberapa hal yang cukup luas dalam organisasi, secara umum pengembangan SDM didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang (Gozali et al., 2021). Pengembangan SDM baik dilakukan kepada para pengelola usaha, tidak hanya pemilik, hal ini diakibatkan pengelola termasuk ke dalam pelaku usaha yang terjun langsung dalam mengelola operasional bisnis secara regular. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi SDM menjadi penting dalam strategi penguatan bisnis baik kompetensi manajerial, praktik, prosedural, kerja sama, kedisiplinan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (Eka et al., 2022)

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja bisnis. Hasil penelitian yang dilakukan Ardiana, Brahmayanti, menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja usaha. Semakin tinggi kompetensi, dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga, aspek pengembangan SDM sangat dibutuhkan oleh sektor usaha, baik itu pengelola, pelaksana serta pemilik (Hamidi et al, 2021). Di sisi makro, strategi pembangunan sektor industri menjadi pijakan untuk mengembangkan tingkat perekonomian (Bashir et al., 2020). Salah satu sektor penting sebagai penggerak roda perekonomian, khususnya di negara

berkembang, adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Naufalin, 2020).

Kompetensi pelaku UMKM sering kali masih terbatas pada aspek produksi dan kurang di bidang manajerial, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, serta inovasi produk. Keterbatasan ini menghambat kemampuan UMKM untuk bersaing, tumbuh, dan berkembang, baik di pasar lokal maupun global. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator dalam pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya dapat memanfaatkan hasil dari pelatihan yang diberikan, baik karena keterbatasan waktu maupun minimnya pendampingan lanjutan setelah pelatihan.

Program-program pengembangan kompetensi yang disediakan pemerintah sering kali bersifat umum dan tidak spesifik sesuai kebutuhan lokal. Setiap UMKM di Kecamatan Galesong Selatan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, tergantung pada sektor usaha dan skala bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terarah dalam memberikan pelatihan dan para pelaku UMKM. Pemerintah harus mampu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga pengembangan kompetensi pelaku UMKM bisa optimal.

Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam hal pemberian akses terhadap permodalan. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha, baik karena kurangnya informasi mengenai sumber-sumber pembiayaan maupun kendala administratif. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai akses pembiayaan, serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga keuangan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur pendukung yang memadai untuk pengembangan UMKM. Di Kecamatan Galesong Selatan, infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi produk, serta mendorong daya saing UMKM lokal. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa akses jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik lainnya tersedia dan dalam kondisi yang baik, sehingga aktivitas usaha UMKM dapat berjalan lancar.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting dalam upaya pengembangan kompetensi pelaku UMKM. Pemerintah daerah, dalam khususnya Kabupaten Takalar, harus bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini dan penyelenggaraan program-program pengembangan UMKM. Selain itu, pemerintah juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan program pelatihan dan pendamping yang berkualitas.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mempromosikan produk-produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Melalui pameran, bazar, dan kegiatan promosi lainnya, produk-produk UMKM di Kecamatan Galesong Selatan dapat lebih dikenal oleh konsumen. Promosi yang efektif akan meningkatkan daya jual produk,

sekaligus memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Pengembangan kompetensi pelaku UMKM juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwirausaha. Pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam program-program kewirausahaan, sehingga lebih banyak orang yang terlibat dalam sektor UMKM. Semakin banyaknya pelaku UMKM yang kompeten, ekonomi lokal di Kecamatan Galesong Selatan dapat tumbuh lebih kuat.

Kecamatan Galesong Selatan merupakan wilayah dengan potensi besar dalam pengembangan UMKM. Berbagai jenis usaha lokal, seperti perdagangan, pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan, telah menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Namun, tanpa adanya peningkatan kompetensi, pelaku UMKM akan sulit mengoptimalkan potensi yang ada. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM wilayah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?

C. Tujuan`

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan kompetensi UMKM di kecamatan. Selain itu juga untuk pengembangan teori-teori yang membahas mengenai Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM yang menarik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita ketahui karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi. Didalam pengembangan perusahaan, sumber daya manusia faktor terpenting pendukung berlangsungnya suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat MSDM merupakan aktifitas yang mengelola manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting di dalam perusahaan. Dalam setiap aktivitas perusahaan akan selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai penggerak. Manajemen sumber daya manusia sendiri adalah suatu seni yang melakukan proses pemeliharaan karyawan secara manusiawi agar potensi yang dimiliki dapat berfungsi maksimal bagi ketercapaian tujuan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan manusia sebagai pelaku dari terciptanya ide, pengelolaan operasional perusahaan, pengelolaan keuangan dan juga sebagai tenaga promosi (Siagian, S 2023).

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif individu yang terdapat di dalam suatu organisasi melalui sejumlah cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Para pimpinan bekerja melalui upaya orang lain atau bawahan sehingga ia membutuhkan pemahaman tentang beberapa konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer mencari cara terbaik dalam mempekerjakan karyawannya agar dapat tercapai tujuan perusahaannya. Pendayagunaan sumber daya manusia yang tepat menyangkut pemahaman terhadap kebutuhan individual agar potensi sumber daya manusia dapat digali dan dimanfaatkan secara penuh. Hal terpenting dari manajemen sumber daya manusia yaitu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara penuh dan berkesinambungan terhadap sumber daya manusia yang ada sehingga mereka dapat bekerja secara optimal, efektif, dan produktif dalam pencapaian tujuan perusahaan. (Wibowo et al., 2023)

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pengakuan bagaimana pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya yang mempunyai kontribusi bagi tujuan organisasi tersebut, dalam pengelolaan dan penggunaannya dapat dipastikan bahwa sumber daya manusia tersebut dapat dikelola secara efektif dan adil untuk kepentingan individu, organisasi maupun masyarakat. Dalam sebuah kebijakan, pengertian MSDM dapat didefinisikan sebagai sebuah sarana dalam proses memaksimalkan efektivitas sebuah organisasi yang dalam kaitannya untuk mencapai tujuan.

Menurut Darmadi, manajemen sumber daya alam dapat diartikan

sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produksi dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Pemerintah

Kata pemerintahan berbeda dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif (Sugiman, 2018).

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri.

Menurut UUD 1945 pemerintah ialah presiden, wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua

organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). 1 pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan(Sugiman, 2018).

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negaran memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi seta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan pemerintah pusat(Sugiman, 2018).

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggara unsur pemerintah daerah dan DPRD adalah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Manongga, 2021)

Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No Tahun 22 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Manongga, 2021).

3. Pengembangan kompetensi UMKM

a. Pengertian Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku UMKM agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan manajerial, penguasaan teknologi, strategi pemasaran, hingga kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Tujuan utama pengembangan kompetensi UMKM adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang lebih handal dan inovatif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan aspek penting dalam pengembangan kompetensi UMKM adalah pelatihan dan pendidikan.

Pelatihan tersebut dapat mencakup berbagai topik seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan inovasi produk. Pendidikan dan pelatihan ini krusial mengingat banyak pelaku UMKM yang memulai bisnis dengan pengetahuan terbatas dalam bidang bisnis atau manajemen. Oleh karena itu, peningkatan

pendidikan formal maupun informal menjadi bagian integral dalam mengembangkan kompetensi pelaku usaha(Waqfin et al., 2021).

Selain, akses terhadap teknologi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan kompetensi UMKM. Teknologi digital, khususnya, memiliki peran besar dalam membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan memperbaiki komunikasi dengan konsumen. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki dalam memanfaatkan teknologi digital. Priyono S. & Fitriani R. (2022)

Dalam konteks globalisasi, kompetensi UMKM juga harus memperhatikan kemampuan dalam mengakses pasar global. Kompetensi dalam memahami regulasi internasional, standar kualitas, serta kemampuan bernegosiasi dengan mitra dari luar negeri menjadi semakin penting. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga memperluas jangkauan bisnis mereka ke pasar internasional yang lebih luas.(Priyono S. & Fitriani R. (2022).

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi juga tidak dapat diabaikan pemerintah, melalui berbagai program dan kebijakan, berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas akses terhadap permodalan dan teknologi bagi pelaku UMKM. Program-program pengembangan ini biasanya difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar dapat menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan global(Waqfin et al., 2021).

Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi UMKM proses yang berkelanjutan dan multifaset, yang membutuhkan sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak swasta. Dengan pengembangan kompetensi yang baik, UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan, berinovasi, dan terus tumbuh menjadi sektor yang kuat dalam perekonomian nasional.

1. Faktor-faktor Pengembangan Kompetensi UMKM

- a. Pelatihan dan pendidikan salah satu faktor utama dalam pengembangan kompetensi UMKM adalah pelatihan dan pendidikan, program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memperbarui keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM (Wibowo et al., 2023)
- b. Teknologi dan inovasi penerapan teknologi merupakan faktor penting lainnya dalam pengembangan kompetensi UMKM. Di era digital, UMKM harus mampu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan penggunaan sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi.
- c. Pendampingan dan Konsultasi Bisnis Pendampingan bisnis menjadi faktor krusial dalam proses pengembangan kompetensi UMKM. Melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM mendapat arahan dalam mengelola usaha secara profesional.
- d. Kerja Sama Antar Pelaku UMKM Kolaborasi antar pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam peningkatan kompetensi. Dengan kerja sama, pelaku UMKM dapat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kolaborasi juga dapat memperkuat

posisi mereka dalam menghadapi tantangan pasar serta meningkatkan inovasi produk. Forum atau komunitas UMKM bisa menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk saling belajar dan berbagi praktik bisnis terbaik.

- e. Dukungan Pemerintah, Pemerintah memiliki peran signifikan dalam pengembangan kompetensi UMKM, terutama melalui kebijakan yang mendukung ekosistem usaha. Program-program pelatihan, penyediaan akses pembiayaan, dan pembentukan regulasi yang mendukung menjadi salah satu wujud peran pemerintah dalam mendorong pengembangan kompetensi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran-pameran nasional dan internasional guna memperluas jaringan bisnis (Wibowo et al., 2023)

b. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan implikasi dari pembagian atau kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Usaha mikro merupakan usaha formal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umunya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha (Sofyan, 2017).

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional (Fadilah et al., 2021)

UMKM mempunyai definisi yang beragam dengan rumusan tentang usaha kecil dalam berbagai variasi nama, misalnya (1) Biro pusat statistik (BPS) menggunakan kriteria jumlah orang yang dipekerjakan; (2) kementerian perindustrian, menggunakan kriteria finansial semacam investasi modal untuk mesin dan peralatan serta investasi semacam investasi modal untuk mesin dan peralatan serta investasi per tenaga kerja; (3) Bank Indonesia, menggunakan kriteria finansial, semacam kekayaan dan omzet; (4) Kementerian perdagangan menggunakan kriteria maksimum modal aktif untuk usaha dagang; (5) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) menggunakan kriteria modal, yang disesuaikan dengan sektor-sektor ekonomi. (Hartono, Deny Dwi Hartono 2016)

Tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.(Sofyan,2017)

b. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

a. Livelihood Activities, merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, seperti pedagang kaki lima, b. Micro Enterprise, suatu usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai sifat-sifat sebagai pengrajin namun belum mempunyai sifat-sifat kewirausahaan. c. Small Dynamic Enterprise yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. D. Fast Moving Enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan pelaku usaha akan melakukan pengembangan atau transformasi menjadi usaha berskala besar(UB).

c. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terdapat beberapa ciri usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu: a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-sewaktu bisa berpindah; c. belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan sering kali tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha; d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni; e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah; f. Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai

jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke lembaga-lembaga keuangan bukan bank; g. Umumnya para pelaku usaha kecil belum mendapatkan bukti legalitas atau surat ijin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak(NPWP)

d. Karakteristik UMKM

Karakteristik dari usaha mikro, kecil dan menengah adalah bersifat faktual dan melekat dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun perilaku pengusaha itu sendiri. Karakteristik tersebut menjadi ciri yang membedakan antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Bank Dunia mengelompokkan UMKM menjadi tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro yaitu usaha yang mempekerjakan karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil yaitu usaha yang mempekerjakan karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah yaitu usaha yang mempekerjakan karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha menurut Bank Indonesia (2015) UMKM dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: 1. UMKM Mikro adalah para pelaku UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin termasuk di dalamnya UMKM sektor informal, seperti pedagang kaki lima yang kurang mampu mengembangkan usahanya karena mereka kurang mempunyai jiwa kewirausahaan. 2. Usaha Kecil Dinamis merupakan suatu kelompok UMKM yang mampu menjadi wirausahawan dengan menjalin kerja sama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor. 3. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang cakap dan telah siap mengembangkan usahanya menjadi usaha besar karena telah mempunyai jiwa kewirausahaan (Al Farisi, Iqbal Fasa, & Suharto, 2022)

e. Manfaat UMKM

1. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

2. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rismayanti Tohir, Hanny Purnamasari, dan Indra Aditya pada (2023)	Peran Pemerintah Desa : Pengembangan Umkm Di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan	pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Lebakmuncang telah berhasil dalam mengembangkan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang, Ciwidey, Bandung. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti minimnya kunjungan wisatawan, kesulitan dalam pemasaran produk, minimnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya integrasi antara UMKM dengan kegiatan pariwisata, serta akses pembiayaan yang masih minim. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam mendorong pengembangan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2.	Monica Dwipi Salam dan Ananta Prathama (2020)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di	pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.	penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah berhasil menjalankan perannya sebagai stabilisator, inovator, modernisator,

				<p>dan pelopor dalam pengembangan UMKM di Kampung Kue. Mereka memberikan bimbingan pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan inovasi para pelaku UMKM. Selain itu, melalui inovasi berupa aplikasi E-Peken, para pelaku UMKM di Kampung Kue dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan produk mereka. Hal ini membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya.</p>
3.	<p>Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, dan Yeti Lis Purnamadewi (2019)</p>	<p>Analisis Kinerja Dan Strategi Pengembangan Umkm Alas Kaki Di Desa Pagelaran</p>	<p>Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan</p>	<p>penelitian ini mencakup analisis kinerja variabel-variabel terkait pengembangan usaha alas kaki di Desa Pagelaran. Ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat kepentingan dan kondisi variabel-variabel tersebut. Variabel aksesibilitas distribusi menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai 269%, sementara variabel peran kelompok usaha dan peran pemerintah memiliki kinerja terendah dengan nilai 33%. Disarankan untuk meningkatkan peran pemerintah desa melalui program pemberdayaan</p>

				masyarakat dan pembentukan BUMDes untuk mendukung pengusaha alas kaki. Strategi pengembangan UMKM alas kaki di Desa Pagelaran juga disusun berdasarkan analisis IPA untuk meningkatkan kinerja variabel-variabel kunci.
4.	Hilya Usrotun Putri Diaz, Rendy Sueztra Canaldhy, dan NoviaKencana (2019)	Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Industri Batu Bata	pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pemasaran industri batu bata masih perlu ditingkatkan. Meskipun SDM yang tersedia cukup banyak, kurangnya pelatihan khusus untuk tenaga kerja, inovasi yang lebih maju, serta peningkatan kualitas SDM secara rutin dan berkelanjutan menjadi tantangan. Selain itu, dalam pengembangan pemasaran, terdapat kekurangan dalam promosi melalui media sosial dan proteksi pasar, yang mengakibatkan ke tidak seragaman harga antar pemilik batu bata dalam penjualan produk mereka.
5.	Taranggana Gani Putra (2015)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik	pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Hasil pembahasan dari penelitian ini mencakup peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) manik-manik kaca di

		Kaca di Kabupaten Jombang.		Kabupaten Jombang. Penelitian ini menyoroti bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha telah mempercepat pertumbuhan industri manik-manik kaca di daerah tersebut. Selain pembahasan juga mencakup strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM manik-manik kaca.
6	Bellani Syahputri Siregar, Tomi Jaffisa (2020)	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Laut Dendang	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, bahwa program yang meningkatkan perekonomian keluarga yaitu peneliti menemukan bahwa program UMKM dapat memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat khususnya ibu-ibu dan pengangguran sehingga masyarakat menjadi kreatif dan dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Laut Dendang.

7	Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin (2017)	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Peran pemerintah sebagai fasilitator, (a) pendampingan, (b) pendanaan, (c) permodalan serta (d) pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perindustria n dan Perdagangan dinggap telah berlangsung dengan baik, namun tetap diakui bahwa ketiga hal tersebut masing-masing masih memerlukan perbaikan.
8	Adellia Maharani dan Adie Dwiyanto Nurlukman (2023)	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang	Penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Melalui Sosial Media Dan ECommerce di Kota Tangerang ini, peneliti menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.	. KESIMPULAN Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan akselerator dalam pertumbuhan UMKM Nusajaya Cerdas, menurut riset. bangunan toko produk pelaku UMKM untuk diperjualbelikan secara offline, kemudian sarana pelatihan SDM berupa foto produk dan pelatihan pengemasan serta pemasaran digital, kemudian sarana promosi dan pemasaran melalui media sosial seperti instagram melalui akun @indagkopukm_tanger angkota dan @tangerangkota dan melalui fitur Ayo Rangkul yang ada di E-commerce Tokopedia, pengadaan fasilitas Uji coba lab gratis, peliputan gratis, serta mengadakan event pameran tahunan. Kota Tangerang telah berjalan efektif sebagai

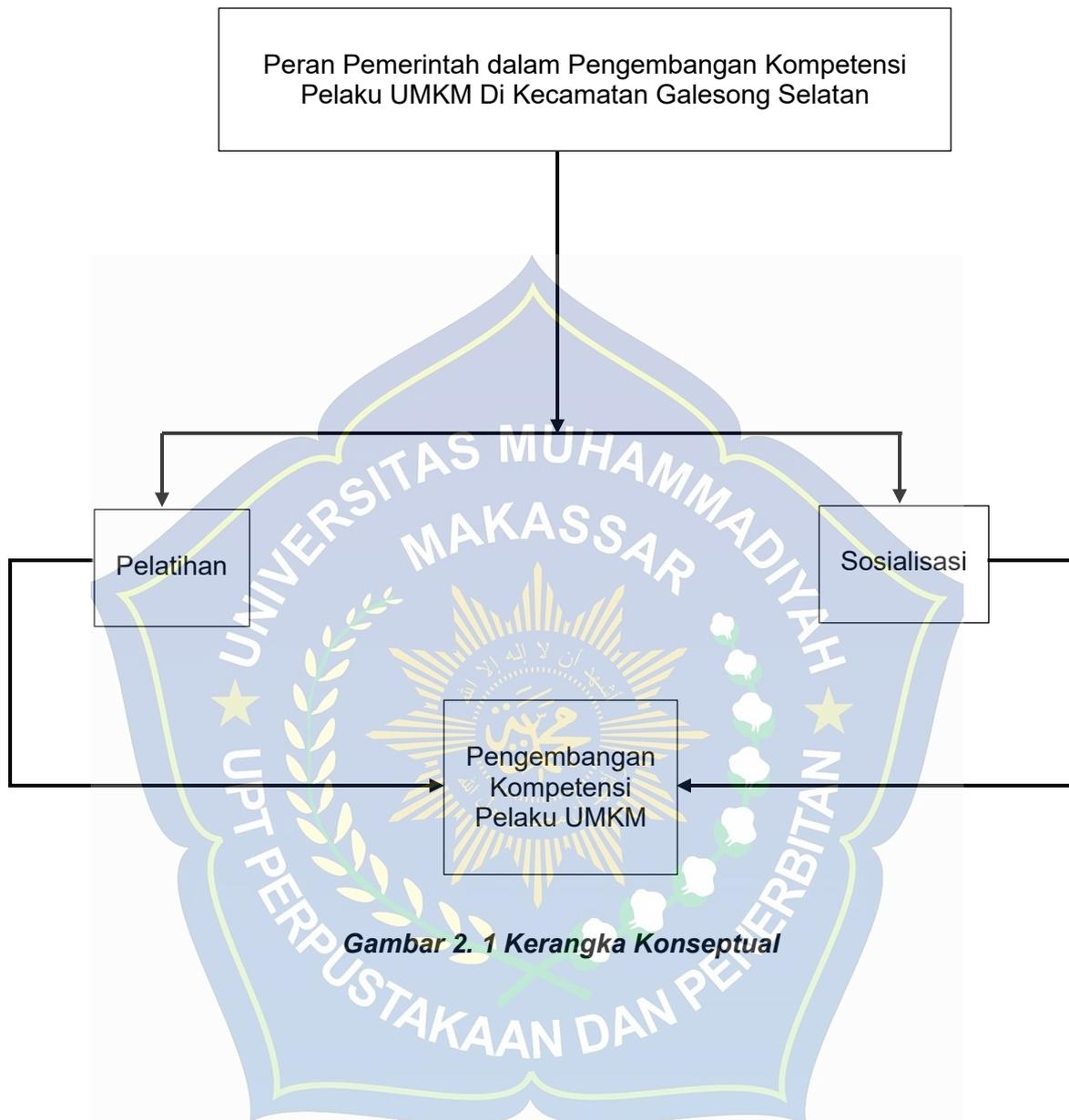
				sarana bagi UMKM Nusajaya Smart
9	Giovanni Malemta Purba	Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)	Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,	Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang disini yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.
10	Muhammad Taufan Gunawan (2022)	Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memecahkan pokok permasalahan.	Secara umum pemerintah Kota Makassar telah menjadikan fokus perhatian semua aspek yang ada di faktor-faktor produksi dalam pengembangan UMKM. Namun aspek yang menjadi dominan ada pada hal-hal yang terkait dengan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada dimensi modal memang memiliki kemampuan dalam meningkatkan pendapatan UMKM (Bhagas et al., 2016), begitu pun dengan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pendapatan UMKM (Sukriani, 2017), namun tentu itu saja tidak cukup untuk mengoptimal UMKM.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemahaman bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah. Namun, agar UMKM dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas,

para pelaku usaha perlu memiliki kompetensi yang mumpuni, baik dalam hal manajerial, teknis, maupun pemasaran. Di sinilah pemerintah memiliki peran sentral. Pemerintah dapat berperan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Melalui pelatihan, penyediaan fasilitas bisnis, akses ke informasi, serta bantuan keuangan atau pendanaan, pemerintah bisa membantu UMKM mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, peran pemerintah juga dapat ditinjau dari aspek regulasi dan fasilitasi akses pasar. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang memudahkan UMKM untuk beroperasi, mengakses permodalan, serta melindungi kepentingan mereka dari persaingan yang tidak sehat. Di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, pemerintah setempat berpotensi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik para pelaku UMKM di daerah tersebut dan merancang program-program pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode yang digunakan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Menurut (sugiyono 2020) Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci. Metode kualitatif deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 5 orang pelaku UMKM yang ada di kota Makassar.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sehingga dapat diketahui manfaat dana desa bagi pengembangan Umkm di Kecamatan Galesong Selatan.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

1. Situs Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Galesong

merupakan salah satu Kecamatan pusat pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat. Pertumbuhan Galesong Selatan yang pesat ini diharapkan mampu mendorong perekonomian wilayah lain di sekitarnya sehingga lokasi tersebut penting untuk diteliti

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian untuk penelitian yaitu selama dua bulan, dimulai pada bulan November 2024 sampai dengan Januari 2025

D. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus, Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya bersumber dari dokumen, laporan-laporan, buku- buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni kegiatan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang jelas susunannya. Penanya tidak akan menanyakan hal selain daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti nantinya, daftar pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara yang dilakukan pada informan.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber

pustaka, badan pusat statistik dan publikasi resmi pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini teknik pemilihan responden atau informan yang peneliti gunakan adalah teknik *Purposive sampling* yang berarti teknik pengambil sampel secara sengaja, Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. maka responden atau informan dalam penelitian ini adalah 5 pelaku UMKM yang dianggap mampu memberikan data yang diinginkan. Karena peneliti memiliki batasan dalam melakukan wawancara yaitu hanya pada Pegawai Pemerintahan yang ada di Kantor Kecamatan dan dari pelaku UMKM yaitu toko grosir, pengrajin dan pedagang kaki lima. Berikut ini daftar informan

Tabel 3. 1 Daftar Informan

NO	NAMA	Jabatan	Keterangan
1.	Muh. Ilham, SE	Kasi Pemerintahan	Informan Kunci
2.	Rahmatia R, S.Ag	Kasi Perekonomian	Informan Utama
3.	Muh. Adnan	Kios	Informan Pendukung
4.	Nana Mardiana	Pengrajin	Informan Pendukung
5.	Bahtiar	Pedagang kaki lima	Informan Pendukung
JUMLAH			5

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Menurut sugiono (2018), Metode pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk bertemu dengan objek penelitian. Adapun beberapa teknik yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran awal tentang penelitian tersebut. Menurut Nasution merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi menurut faisal diklarifikasikan menjadi tiga observasi berpratisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang terstruktur. Pengamatan yang dilakukan berupa observasi kepada umkm yang berada di kecamatan Galesong Selatan aktivitas masyarakat yang dilakukan yaitu berjualan. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas para umkm dalam memasarkan produk.
2. Wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk melakukan interaksi antara peneliti dan objek penelitian. Dalam melakukan wawancara kepada informan peneliti hanya mengambil responden pada UMKM Pedagang atau tokoh grosir sesuai fokus penelitian ini. Pada proses ini peneliti akan melakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bersifat bebas dengan menggunakan pedoman wawancara secara garis besar kepada pelaku UMKM Peneliti saat di lapangan melakukan

wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung ke tokohnya. Untuk mendapatkan informasi dalam berbentuk tulisan atau rekaman audio.

3. Dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini untuk mendukung data wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data berupa dokumentasi pada proses penelitian berlangsung dan juga berupa alat perekam serta alat tulis dalam proses pengumpulan data

G. Metode Analisis Data

Menurut Sugiono (2018) Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan mempengaruhi suatu fenomena. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka metode deskriptif yang paling tepat untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun kerja dari deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan *data (data collection)*, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

1. Pengumpulan Data

Pada langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data hasil wawancara, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

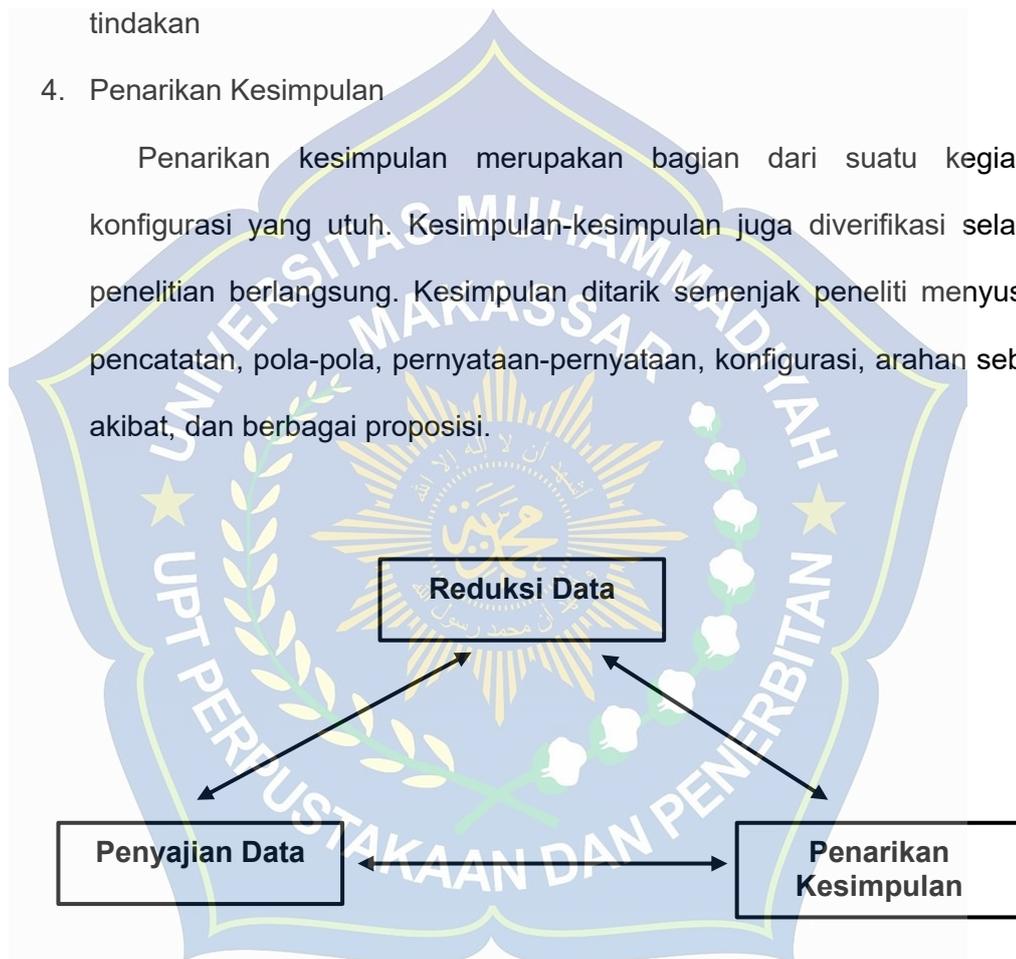
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.



Gambar 3.1 Metode Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambar Umum Kecamatan Galesong Selatan

Galesong Selatan sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah Selatan dan berjarak kurang lebih 10 kilometer dari ibu kota Kabupaten Takalar. Ibu Kota Kecamatan Galesong Selatan terletak di desa Bontokassi yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten gowa dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. Luas wilayah Kecamatan Galesong Selatan sekitar 44 km².

Secara geografis, wilayah ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pesisir Pantai hingga area pertanian dan pemukiman. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Visi dan Misi Kecamatan Galesong Selatan

a) Visi

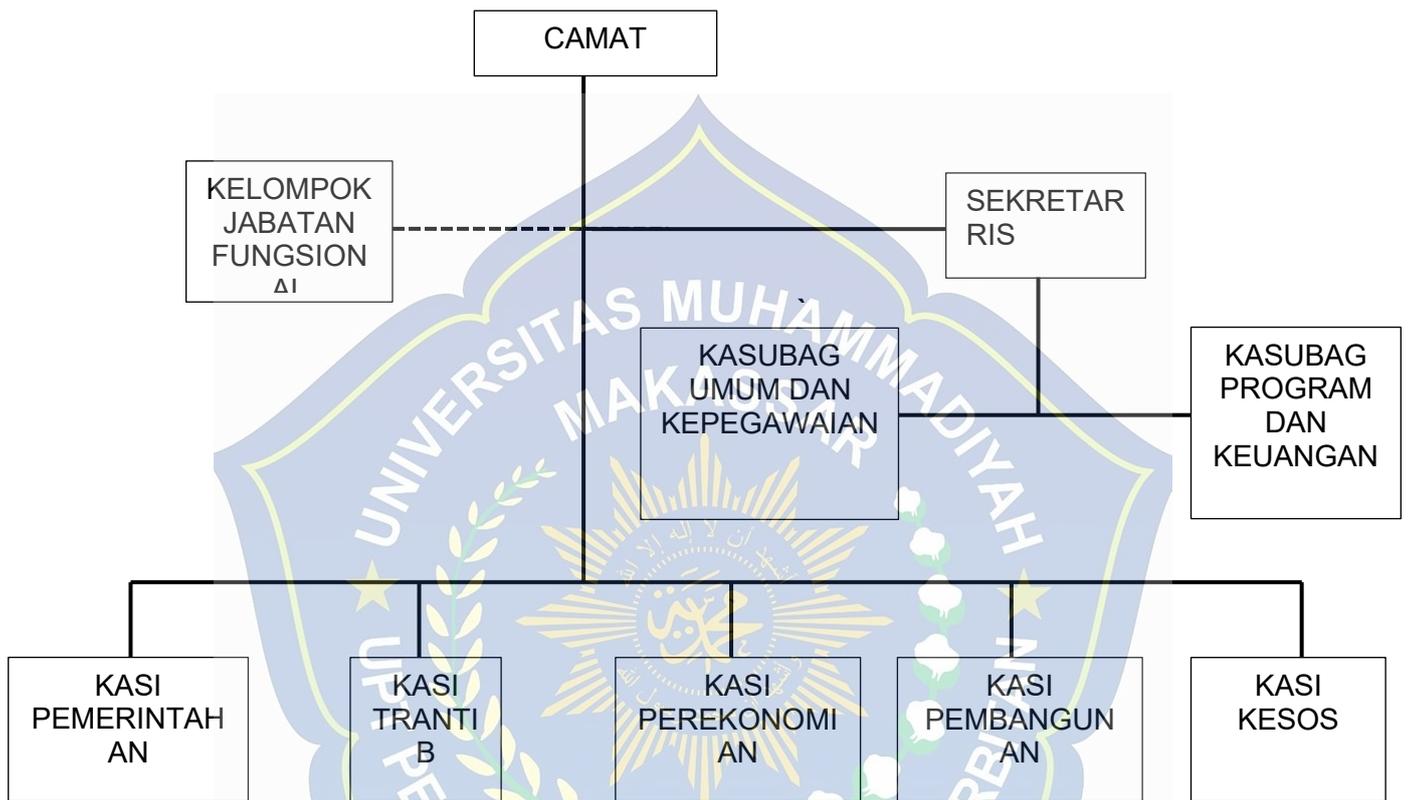
Terwujudnya Kecamatan Galesong Selatan yang unggul, Sejahtera dan bermanfaat

b) Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prduktivitas masyarakat
- 2) Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat

- 3) Menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokrasi

3. Struktur Kecamatan Galesong Selatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Job Description

a. Camat

- 1) Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- 7) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 8) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 9) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 10) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat kecamatan
- 12) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
- 13) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

b. Sekretaris

- 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- 7) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada camat dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum kecamatan;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Dan Kepegawaian

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- 7) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 8) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 11) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan;
- 12) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

- 13) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 14) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- 15) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 16) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- 17) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 18) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan kecamatan;
- 19) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- 20) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 21) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Sub Bagian Program & Keuangan

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun rencana, pengelolaan data dan informasi;
- 7) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan dengan instansi terkait;
- 8) Melaksanakan koordinasi penganggaran program kerja;
- 9) Menyiapkan bahan rapat kerja, rapat koordinasi, dan pembahasan program kecamatan;
- 10) Melakukan bimbingan teknis penyusunan program kerja dan penganggaran;
- 11) Melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan tiap unit kerja;
- 12) Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 13) Menyusun Rancangan Program kerja untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta rencana strategis kecamatan;
- 14) Melakukan tindak lanjut temuan dari kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dan urusan keuangan;
- 15) Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;

- 16) Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis kecamatan;
 - 17) Menginventarisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan;
 - 18) Mencatat pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah dalam lingkup kecamatan;
 - 19) Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - 20) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan,
 - 21) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - 22) Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan;
 - 23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Kepala Pemerintahan
- 1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;

- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- 8) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 9) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 11) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 12) Melaksanakan koordinasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/instansi pemerintah di kecamatan;
- 13) Memfasilitasi penataan kelurahan dan desa;
- 14) Memfasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan dan desa;
- 15) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;
- 16) Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 17) Melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - 7) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
 - 8) Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - 9) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - 10) Memfasilitasi dan mengoordinasi kegiatan untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 11) Menyusun rencana bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dalam setiap aktivitas masyarakat;
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kepala Seksi Perekonomian

- 1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perekonomian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- 9) Memberik petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 10) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- 11) Memfasilitasi dan mengoordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- 12) Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan dan desa;

13) Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

h. Kepala Pembangunan

1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perekonomian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;

5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;

6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

7) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

8) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

9) Memberik petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

10) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;

11) Memfasilitasi dan mengoordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;

- 12) Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan dan desa;
 - 13) Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 15) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 16) Laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diebrikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- i. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 1) Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - 7) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;

- 8) Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 9) Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- 10) Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 12) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan;
- 13) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;
- 14) Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat;
- 15) Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- 16) Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 17) Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 18) Laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan informasi pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian. Berikut ini penjelasannya

1. Identitas Informan

Tabel 4.1

Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Muh. Ilham, SE	MI	Kasi Pemerintahan	1 Orang
2.	Rahmatia R, S.Ag	RR	Kasi Perekonomian	1 Orang
3.	Muh. Adhang	MA	Kios	1 Orang
4.	Nana Mardiana	NM	Pengrajin	1 Orang
5.	Bahtiar	B	Pedagang Kaki lima	1 Orang

Berdasarkan table di atas , dapat dijelaskan bahwa informan berjumlah 5 orang, terdapat pemerintah 2 dan pelaku Umkm 3 untuk pengembangan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Hasil Wawancara

Bagian ini menggambarkan mengenai deskripsi data penelitian khususnya yang berhubungan dengan informasi penelitian yaitu bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Galesong Selatan Kabupaten Takalar , selain itu juga akan di jelaskan terkait bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, peneliti pertama melakukan interkasi dengan masyarakat terkait dengan pengembangan UMKM yang ada di kecamatan galesong Selatan kabupaten takalar, peneliti menggali informasi mengenai rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti

maka dalam menggali data sesuai pedoman wawancara, peneliti menyelidiki tentang peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Agar terdeskripsi data hasil penelitian sesuai urutan pedoman wawancara, yakni sebagai berikut.

a. Program Pelatihan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM? MI mengatakan bahwa:

“biasanya pemerintah memberikan pelatihan seperti, pelatihan digitalisasi UMKM, pelatihan jaringan dan kemitraan”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Perekonomian pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, RR mengatakan bahwa:

“Manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, legalitas usaha, inovasi produk, serta pelatihan teknis sesuai sektor usaha”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM kios pada hari Sabtu 1 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, MA mengatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan pelatihan pemasaran digital, pengelolaan keuangan serta keterampilan”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pengrajin Pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, NM mengatakan bahwa:

“Pemerintah biasanya memberikan berbagai jenis pelatihan kepada kami pengrajin songkok guru, seperti Pelatihan keterampilan produksi: Meliputi teknik pembuatan songkok yang lebih modern dan efisien tanpa menghilangkan nilai tradisional”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pedagang kaki lima pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, B mengatakan bahwa:

“Pemerintah sering memberikan pelatihan kepada kami pedagang kaki lima dalam berbagai aspek usaha, seperti manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran digital”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagai pelaku umkm perlu untuk mengembangkan usaha atau mengikuti pelatihan dan menganalisis trend pasar ataupun kompetensi untuk mengembangkan usaha itu ada beberapa cara yang dilakukan seperti mengatur keuangan dan juga bagaimana melakukan keterampilan di saat ada di lapangan.

b. Melakukan Sosialisasi

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil? MI Mengatkan bahwa:

“Pemerintah dapat memastikan sosialisasi benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil dan strategi yang di lakukan yaitu pendekatan berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat atau ketua kelompok UMKIM dan pemanfaatan teknologi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Perekonomian pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah

memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? RR mengatakan bahwa:

“Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, media digital, serta kunjungan langsung”

“Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pelaku UMKM Tokoh grosir pada hari Sabtu 1 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? MA mengatakan bahwa:

“Biasanya pemerintah melakukan pendampingan lapangan dan bekerja pemerintah daerah untuk memastikan informasi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM Pengrajin pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMIM? NM mengatakan bahwa:

“Dari pengalaman kami, sosialisasi ke daerah terpencil masih kurang optimal. Banyak pelaku UMKM di desa yang tidak mengetahui program yang ada karena kurangnya akses internet atau keterbatasan media komunikasi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pedagang kaki lima pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? B mengatakan bahwa:

“Pemerintah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan langsung melalui dinas terkait, menggunakan media sosial”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan pada informan bahwa dengan berkolaborasi, UMKM dapat mengurangi biaya produksi melalui pembelian bahan baku secara kolektif atau berbagai

sumber daya produksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional mereka, dan bertukar ide dengan UMKM lain atau mendorong inovasi produk dan layanan. Dan melalui kerja sama dengan organisasi seperti perbankan, lembaga keuangan mikro, atau program bantuan pemerintah, UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap modal usaha, kredit berbunga rendah, atau hibah pengembangan usaha.

C. Pembahasan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program pelatihan, dan sosialisasi serta bantuan modal dan pemasaran yang bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan bisnis, manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Salah satu peran utama pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kebijakan tersebut meliputi regulasi yang mempermudah perizinan usaha, pemberian insentif pajak, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya regulasi yang berpihak pada UMKM, para pelaku usaha kecil dapat lebih mudah mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani oleh prosedur.

Selain kebijakan, pemerintah juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai program pelatihan seperti manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan penggunaan teknologi digital diselenggarakan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, organisasi bisnis, serta sektor swasta untuk memberikan pendampingan dan bimbingan teknis agar UMKM lebih profesional dalam menjalankan usahanya.

pemerintah juga berperan dalam memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM. Banyak UMKM di Galesong Selatan menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha akibat keterbatasan jaminan dan tingginya suku bunga pinjaman di lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai skema bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hibah modal usaha dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya bunga yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menjadi bagian dari peran pemerintah dalam pengembangan kompetensi pelaku usaha. Regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti kemudahan perizinan usaha, perlindungan hak cipta, serta insentif pajak, akan memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, pendampingan dan konsultasi bisnis yang diberikan oleh pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait aspek legalitas usaha. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan UMKM di Galesong Selatan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan melalui pelatihan inovasi produk, pengembangan sentra UMKM, dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, daya saing, dan pemasaran produk lokal, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan akses pelatihan, pendampingan berkelanjutan, serta mempercepat pembangunan sentra UMKM agar pelaku usaha lebih mandiri dan kompetitif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta perlu diperkuat untuk mendukung inovasi dan pemasaran produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anto, R. P., Rahmatyah, S., Amir, M., Gunawan, G., Sahili, L. O., Habiba, N., & Saputri, A. (2023). Penyuluhan Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kompetensi Kewirausahaan Pelaku Usaha Penjual Jagung Rebus di Desa Amesi. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i1.2509>
- Eka, D., Diah, Y. M., Taufik, T., Bunga, C. A. C., Putriana, V. N., Febianti, D., ... Arifuddin, Z. (2022). Peranan Kompetensi SDM dalam Meningkatkan Industri UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.56>
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Manongga, K. A. (2021). Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM. *Bilancia*, 11(1), 33–64.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Siagian, S (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta CV
- Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta CV
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Binamulia hukum 7(1), 82-95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Waqfin, M. S. I., Wulandari, S. R., Tifliya, F. M., Indrayani, S., Wahyudi, W., & Roziqin, M. K. (2021). Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM di Desa Kepuhdoko Jombang. *Jumat*

Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 155–159.
https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v2i3.2112

Wibowo, A., Respati, D. K., Suparno, S., Saptono, A., Suherman, S., & Pahala, I. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Pelaku Umkm Di Desa Cibitung Tengah. *D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 23.
<https://doi.org/10.25273/dedukasi.v3i1.16537>



**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran Pedoman Wawancara

Coding Informan:

- MI : Kasi Pemerintahan
 RR : Kasi Pelayanan Umum
 MA : Kios
 NM : Pengrajin
 B : Pedagang Kaki Lima

NO	CODING	TRANSKRIP
1.	MI,RR,MA,NM,B	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?
2.	MI,RR,MA,NM,B	Apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?
3.	MI,RR,MA,NM,B	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM
4.	MI,RR,MA,NM,B	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?
5.	MI,RR,MA,NM,B	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?

6.	MI,RR,MA,NM,B	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?
7.	MI,RR,MA,NM,B	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?



Transkrip Wawancara

Nama : Muh. Ilham, SE

Jabatan : Kasi Pemerintahan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?	Biasanya pemerintah memberikan pelatihan seperti, pelatihan digitalisasi UMKM, pelatihan jaringan dan kemitraan
2.	Apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?	Iya sangat membantu karna pelatihan memberikan peluang dan membantu modal usaha atau kemudahan dalam teknologi
3.	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM?	Pemerintah melakukan evaluasi sebelumnya, program pelatihan yang telah dilaksanakan di evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dan apakah materi diajarkan benar-bener memberikan manfaat bagi UMKM
4.	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?	Pemerintah mengadakan berbagai program peltihan untuk pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing dan keterampilan dan biasanya pemerintah melakukan peltihan setiap tahunnya

5.	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?	Pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan dan bantuan pemerintah bisa bervariasi tergantung beberapa faktor, seperti akses informasi, Tingkat Pendidikan
6.	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?	Pemerintah dapat memastikan sosialisasi benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil dan strategi yang dilakukan yaitu pendekatan berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat atau ketua kelompok UMKIM dan pemanfaatan teknologi.
7.	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?	Melakuka kerja sama dan kunjungan dan sosialisasi langsung ke daerah atau menggunakan seminar dan kolaborasi dengan komunitas UMKM

Nama : Rahmatia R, S.Ag
 Jabatan : Kasi Perekonomian

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?	Manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, legalitas usaha, inovasi produk, serta pelatihan teknis sesuai sektor usaha
2.	Apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?	Ya, pelatihan membantu UMKM meningkatkan keterampilan, efisiensi, dan daya saing di pasar
3.	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM?	Berdasarkan survei kebutuhan UMKM, tren industri, serta masukan dari asosiasi dan akademisi.
4.	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?	Bervariasi, bisa bulanan atau tahunan, tergantung program pemerintah dan anggaran
5.	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?	Masih ada kendala, terutama bagi UMKM di daerah terpencil, meskipun informasi disebarakan melalui berbagai kanal.

6.	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?	Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, media digital, serta kunjungan langsung
7.	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?	Menggunakan website resmi, media sosial, seminar, webinar, dan kolaborasi dengan komunitas UMKM serta penyuluhan langsung.



Nama : Muh. Adnan

Jabatan : Kios

NO	Pertanyaan	Jawaban
1,	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?	Pemerintah memberikan pelatihan pemasaran digital, pengelolaan keuangan serta keterampilan
2.	Apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?	Yaa. Pelatihan tersebut membantu UMKM meningkatkan daya saing
3.	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM?	Materi disusun berdsarkan apa yang dibutuhkan lapangan
4.	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?	Pelatihan diadakan secara ruti, dengan jadwal berkala mislnya tahunan
5.	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?	Sebagian besar mendafatkan informasi melalu berbagai saluran, meski terdapat tantangan dalam penyebaran secara menyeluruh

6.	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?	Biasanya pemerintah melakukan pendampingan lapangan dan bekerja pemerintah daerah untuk memastikan informasi
7.	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?	Program disosialisasikan melalui seminar, dan portal online yang diakses oleh UMKM agar informasi mudah dijangkau dan dipahami



Nama : Nana Mardiana

Jabatan : Pengrajin

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?	Pemerintah biasanya memberikan berbagai jenis pelatihan kepada kami pengrajin songkok guru, seperti Pelatihan keterampilan produksi: Meliputi teknik pembuatan songkok yang lebih modern dan efisien tanpa menghilangkan nilai tradisional.
2.	Apakah pelatihan yang diberikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?	Ya, pelatihan yang diberikan sangat membantu pengrajin songkok guru dalam meningkatkan daya saing mereka. Dengan pelatihan ini, mereka dapat: Meningkatkan kualitas produk agar lebih diminati pasar lokal maupun internasional. dan Menggunakan teknologi digital untuk pemasaran, memperluas jangkauan pelanggan.
3.	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM?	Biasanya, pemerintah melakukan survei atau bekerja sama dengan asosiasi UMKM untuk menentukan materi yang dibutuhkan.

4.	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?	Pelatihan biasanya diadakan beberapa kali dalam setahun, tergantung pada program yang tersedia di daerah kami.
5.	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?	Tidak semua pengrajin songkok guru merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang ada. Beberapa kendala yang sering terjadi: Kurangnya akses informasi bagi pengrajin yang berada di daerah terpencil. Terutama galesong selatan
6.	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?	Dari pengalaman kami, sosialisasi ke daerah terpencil masih kurang optimal. Banyak pelaku UMKM di desa yang tidak mengetahui program yang ada karena kurangnya akses internet atau keterbatasan media komunikasi
7.	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?	Sosialisasi biasanya dilakukan melalui seminar, atau berkolaborasi dengan komunitas sesama penjual songkok guru.

Nama : Bahtiar

Jabatan : Pedagang Kaki Lima

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?	Pemerintah sering memberikan pelatihan kepada kami pedagang kaki lima dalam berbagai aspek usaha, seperti manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran digital
2.	Apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha mereka?	Ya, pelatihan yang diberikan pemerintah cukup membantu pedagang kaki lima dalam meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam hal meningkatkan kualitas produk, memahami strategi pemasaran modern, dan mengelola keuangan usaha secara lebih baik.
3.	Bagaimana pemerintah menentukan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM?	Pemerintah biasanya menentukan materi pelatihan berdasarkan survei kebutuhan UMKM, konsultasi dengan asosiasi pedagang kaki lima, dan hasil

		evaluasi dari pelatihan sebelumnya.
4.	Seberapa sering pemerintah mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM?	frekuensi pelatihan bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah atau pusat
5.	Apakah pelaku UMKM merasa cukup mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah?	Banyak pedagang kaki lima masih merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan dan bantuan pemerintah.
6.	Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?	Pemerintah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan langsung melalui dinas terkait, menggunakan media sosial,
7.	Bagaimana pemerintah menyosialisasikan program-program yang mendukung pengembangan UMKM?	Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti website resmi pemerintah, media sosial, aplikasi digital, serta melalui penyuluhan langsung ke pasar-pasar tradisional.

LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTASI





FOTO BERSAMA KASI PEMERINTAHAN



FOTO BERSAMA KASI PEREKONOMIAN



FOTO BERSAMA PELAKU UMKM (Kios)



FOTO BERSAMA PELAKU UMKM (PENGRAJIN)



FOTO BERSAMA PELAKU UMKM

(PEDAGANG KAKI LIMA)

LAMPIRAN
PERSURATAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 84/05/A.2-II/XII/46/2024 Makassar, 4 Desember 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ILHAM ISMAIL

Stambuk : 105721109921

Jurusan : Manajemen

Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PELAKU UMKM DI KECAMATAN
GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 30986/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5413/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD ILHAM ISMAIL
Nomor Pokok	: 105721109921
Program Studi	: Manajemen
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKU UMKM DI
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Desember 2024 s/d 09 Februari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

No. SERI 302



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Syech Yusuf No. 16 Kab. Takalar
 Email: dpmpstakalar@gmail.com website: www.dpmpstakalar.kab.go.id

Takalar, 11 Desember 2024

Nomor : 382/IP-DPMPTSP/XII/2024 Yth. Kepada
 Lamp. : - Di Camat Galesong Selatan Kab. Takalar
 Perihal : Izin Penelitian Di Takalar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel, Nomor: 30986/S.01/PTSP/2024, Tanggal 05 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/390/BKBP/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ILHAM ISMAIL
 Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 05 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Lingki Apala Desa/Kel. Doping
 Kec. Penrang Kab. Wajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam rangka *Penyusunan Skripsi* dengan judul :

**“PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKU
 UMKM DI KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR”**

Yang akan dilaksanakan : 09 Desember 2024 s/d 09 Februari 2025
 Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat ;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



IB. MEGAWATI IBRAHIM, SE., M.M
 Kepala Pembina Utama Muda
 NIP. : 197202242000032002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
5. Peninggal;



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG SELATAN
 Jalan Sidayu No. 15 Desa Bontokassi Takalar Sulawesi Selatan Kode Pos : 92254
 Laman www.takalarkab.go.id; Pos Elektronik kantorcamatgalsel@gmail.com

Bontokassi, 16 Desember 2024

Nomor : 202A/GS/XII/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 382/IP-DPMPTSP/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 perihal Izin Penelitian. Kantor Kecamatan Galesong Selatan Dengan memberikan Izin kepada Mahasiswa (SI) UNISMUH Makassar dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Peneliti : **MUHAMMAD ILHAM ISMAIL**
 Tempat Tanggal Lahir : Pangkep , 05 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI) UNISMUH Makassar
 Alamat : Lingk.Apala Desa / Kel. Doping Kec. Penrang Kab. Wajo

Judul Penelitian

"PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKU UMKM DI KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Camat Galesong Selatan
2. Agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyimpang dari kegiatan yang dicantumkan.
3. Izin Penelitian ini berlaku sejak Tanggal 09 Desember 2024 s/d 09 february 2025
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Galesong Selatan.

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


 Camat Galesong Selatan,
 AMIRAN, S.Sos
 Eselon Pembina Tk. I
 NIP. 197504142005021005

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor DPMTSP Kab. Takalar
2. Rektor UNISMUH di Makassar
3. ...



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Igra Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA	MUHAMMAD ILHAM ISMAIL			
NIM	105721109921			
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN			
JUDUL SKRIPSI	PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKU UMKM DI KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR			
NAMA PEMBIMBING 1	Sitti Marhumi, S.E., M.M			
NAMA PEMBIMBING 2	Ir. Muhammad Akib, M.M			
NAMA VALIDATOR	Alamsjah, ST., SE., MM			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	6/3/25	Sudah Sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	6/3/25	Sudah Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	6/3/25	Sudah Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian	6/3/25	Sudah Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	6/3/25	Sudah Sesuai	
6	Hasil analisis	6/3/25	Sudah Sesuai	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Igra R. 8 | e-mail: pdt.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Muhammad Ilham Ismail		
NIM		105721109921		
PROGRAM STUDI		Manajemen		
JUDUL SKRIPSI		Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar		
NAMA PEMBIMBING 1		Sitti Marhumi, S.E., MM		
NAMA PEMBIMBING 2		Ir. Muhammad Akib, MM		
NAMA VALIDATOR		M. Hidayat, S.E., MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	24 Maret 2025	1. Penulisan* *terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, open word -> review -> show markup	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui



Bab I Muhammad Ilham Ismail

105721109921

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Mar-2025 03:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2623564840

File name: BAB_Ilham_1.docx (19,74K)

Word count: 919

Character count: 6463

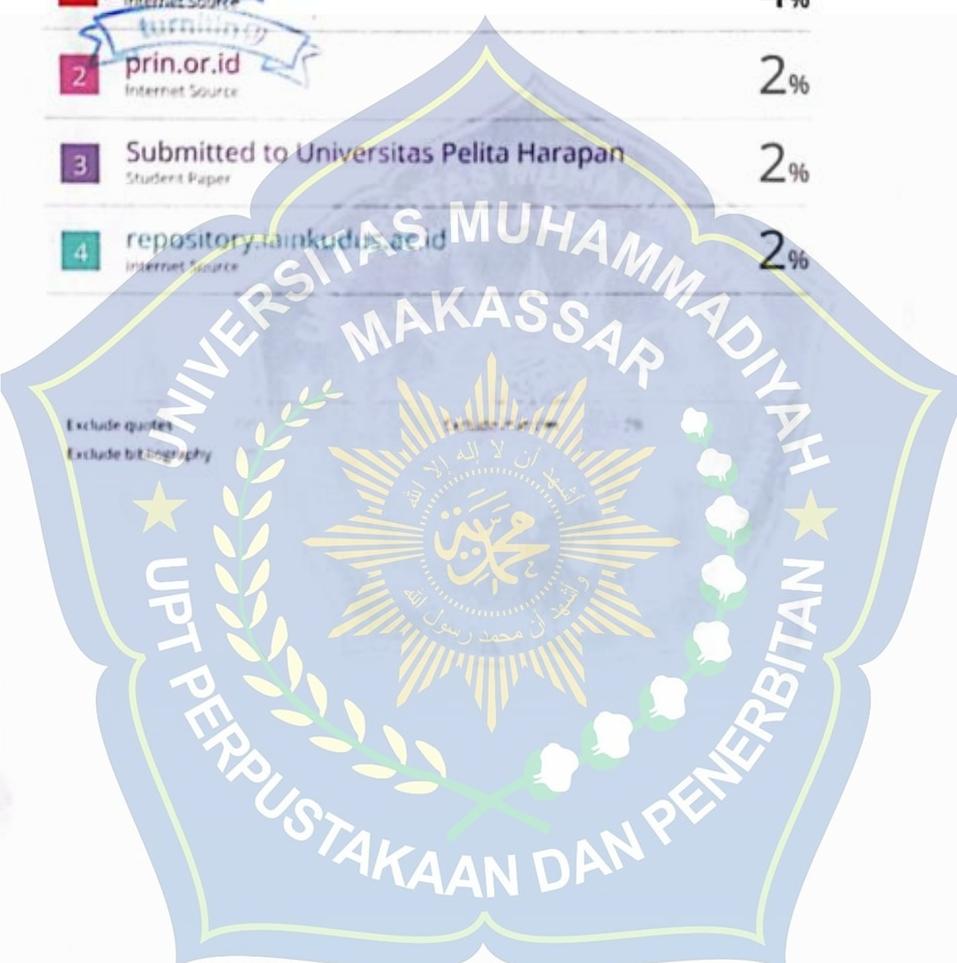


Muhammad Ilham Ismail 105721109921

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



1	docplayer.info Internet Source	4%
2	prin.or.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2%
4	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Bab II Muhammad Ilham Ismail

105721109921

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2025 03:05PM (UTC+0700)
Submission ID: 2623565325
File name: BAB_II_Ilham_1.docx (39.44K)
Word count: 3133
Character count: 21380

Muhammad Ilham Ismail 105721109921

QUALITY REPORT

13% SIMILARITY INDEX **13%** INTERNET SOURCES **9%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	4%
2	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	3%
3	etd.umy.ac.id Internet Source	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	pascasarjanafe.untan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Bab III Muhammad Ilham Ismail

105721109921

by Tahap Tutup

Submission date: 25-Mar-2025 10:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2624508650

File name: BAB_III_ilham_2.docx (29.39K)

Word count: 811

Character count: 5731



Ab III Muhammad Ilham Ismail 105721109921

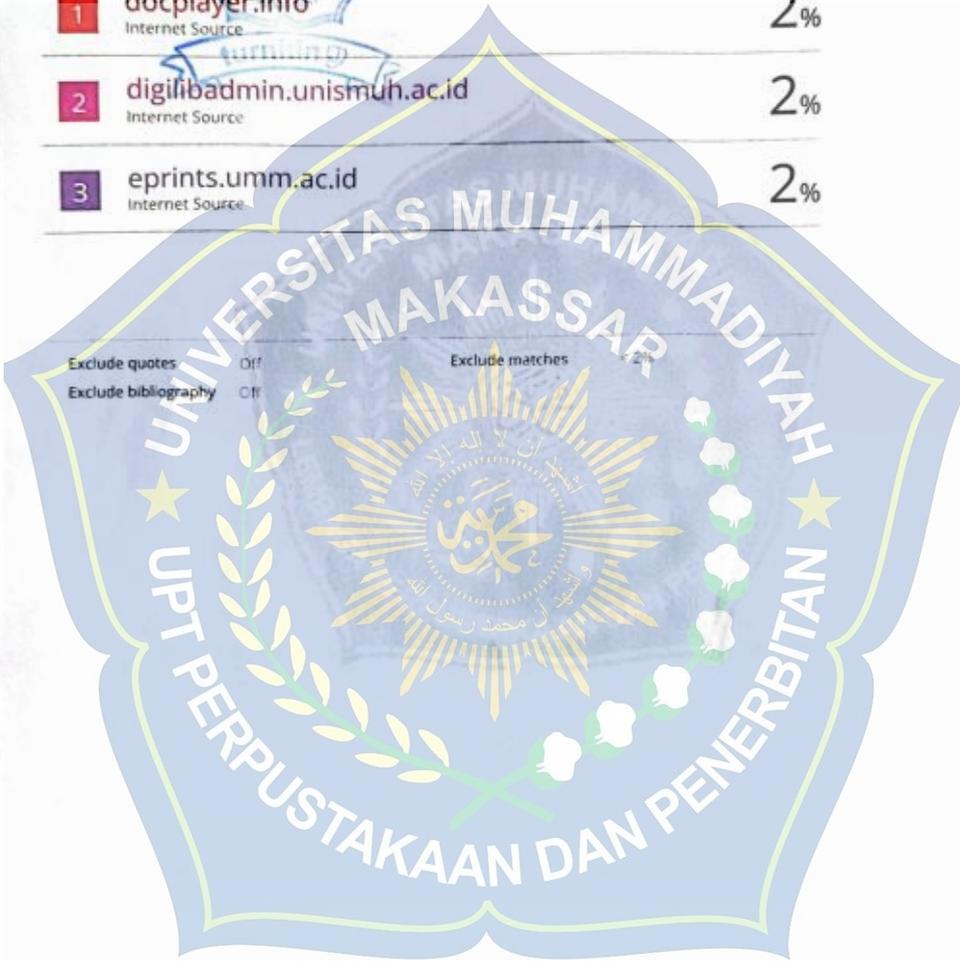
ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX
6% INTERNET SOURCES
3% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off



Bab IV Muhammad Ilham Ismail

105721109921

by Tahap Tutup



TV Muhammad Ilham Ismail 105721109921

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 kutaibarakab.go.id 2%
Internet Source
- 2 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V 2%
Student Paper
- 3 Submitted to Universitas Hasanuddin 2%
Student Paper

Exclude quotes
Exclude bibliography

ORF
ORF

Exclude matches 2%



Bab V Muhammad Ilham Ismail

105721109921

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Mar-2025 01:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2623490533

File name: BAB_V_Ilham.docx (16.74K)

Word count: 86

Character count: 603

U Muhammad Ilham Ismail 105721109921

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411)865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Ismail

Nim : 105721109921

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	13%	25 %
3	Bab 3	6%	15 %
4	Bab 4	5%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 26 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyah, S.Hon.,M.I.P
NBM. 964 591

BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD ILHAM ISMAIL, panggilan Ismail lahir di Pangkep pada tanggal 05 Februari 2002 dari pasangan suami istri Bapak Muh ilyas dan Ibu Patima. Peneliti adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Desa Barangmamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 145 Doping Kabupaten Wajo 2015, SMP Negeri 2 Penrang lulus tahun 2018, SMA Negeri 8 Wajo lulus tahun 2021 dan pada tahun 2021 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang, sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.